

**TANGGAPAN MAHASISWA TENTANG KRITERIA PEMILIH DALAM
PEMILIHAN PRESIDEN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Di UIN Raden Intan Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**SALIS FITRIYANTI
NPM: 1621020133**



Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



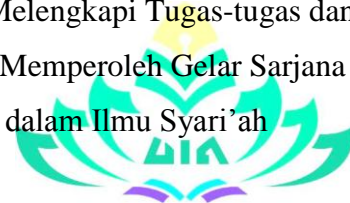
**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TANGGAPAN MAHASISWA TENTANG KRITERIA PEMILIH DALAM
PEMILIHAN PRESIDEN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi Di UIN Raden Intan Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

SALIS FITRIYANTI

NPM: 1621020133

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I: Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Pembimbing II: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020M**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menerapkan pemilihan umum untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pemilihan umum merupakan wujud langsung dari peran serta politik masyarakat. Pemilihan umum tidak membedakan latar belakang sosial budaya, politik, dan ekonomi dari para pemilihnya. Se jauh mereka sudah memenuhi persyaratan formal, tidak seorangpun berhak untuk mencabut haknya. Syarat-syarat pemilih Presiden di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 27 dan 28 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun/lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Ayat (2) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Pasal 28 untuk dapat menggunakan hak memilih WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih. Kriteria pemilih Kepala Negara perspektif *fiqh siyasah* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yang ia sebut dengan *al-ikhtiyar* memiliki kriteria: Pertama, harus adil. Kedua, memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai *khalifah*. Ketiga, memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa sebagai kaum intelektual dapat memberikan tanggapan terkait syarat-syarat pemilih Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa terkait syarat-syarat pemilih Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara perspektif *fiqh siyasah*, yang kemudian akan menghasilkan kriteria pemilih Presiden yang ideal untuk dapat melahirkan Presiden yang ideal berdasarkan syarat-syaratnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan mahasiswa tentang syarat-syarat pemilih dalam pemilihan Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara yang ideal perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa tentang syarat-syarat pemilih dalam pemilihan Presiden di Indonesia dan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa tentang kriteria pemilih Kepala Negara yang ideal perspektif *fiqh siyasah* agar dapat terpilihnya Presiden yang ideal berdasarkan syarat-syaratnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian yaitu UIN Raden Intan Lampung, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017 dengan sampel yang berjumlah 33 mahasiswa dan Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2017 dengan sampel yang berjumlah 7 mahasiswa. Dan data sekunder seperti buku-buku penunjang serta data sekunder seperti kamus hukum, artikel dan jurnal-jurnal. Pengumpulan data menggunakan metode *kuesioner*, wawancara dan

dokumentasi. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, syarat-syarat pemilih Presiden di Indonesia belum efisien untuk menghasilkan Presiden yang ideal. Hal itu dikarenakan rendahnya standar kriteria pemilih Presiden dan kurangnya pendidikan politik di Indonesia yang memungkinkan kurang berkualitasnya hasil suara yang diperoleh. Sedangkan kriteria pemilih Kepala Negara perspektif *fiqh siyasah* sudah sesuai untuk menghasilkan Kepala Negara yang ideal. Sebab pengetahuan dan kecerdasan politik serta sikap bijaksana sangatlah diperlukan. Menggalakkan sosialisasi politik secara masif dan berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat. Selain itu aspek kesejahteraan harus dicapai, maka *intelektualitas* masyarakat secara natural akan meningkat.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Salis Fitriyanti**
NPM : **1621020133**
Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**



Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di UIN Raden Intan Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Februari 2020

Penulis,

Salis Fitriyanti

NPM: 1621020133



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarambe, B. Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Salis Fitriyanti
NPM : 1621020133
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih
Dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah
(Studi Di UIN Raden Intan Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.
NIP. 195607271988031001

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama, B. Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TANGGAPAN MAHASISWA TENTANG KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN PRESIDEN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di UIN Raden Intan Lampung)** Disusun oleh: **SALIS FITRIYANTI, NPM: 1621020133**, Program Studi: **Siyasah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 22 Juni 2020**.

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

Sekretaris : **Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. H. Khairuddin, M.H.**

Penguji I : **Drs. H. Mundzir HZ. M.Ag.**

Penguji II : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIDK 19630221993031002

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ
فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ¹

Dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Apabila ada tiga orang
bepergian hendaklah mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk
menjadi pemimpin rombongan.”*

(HR. Abu Dawud).²

¹ Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadi Abu ath-Thayyib, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), h. 191-192.

² Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, terjemahan Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 96.

PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT, dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'atnya. Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sudawi (alm) dan Ibunda Suprihatin, atas ketulusan mereka dalam mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran serta keikhlasan didalam do'a sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak-kakaku Akhmat Sholikhin dan Abdul Manaf serta Adikku tersayang Ahmad Maliki juga saudara-saudara penulis yang terus medo'akan dan memberi semangat.
3. Almameterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Salis Fitriyanti dilahirkan di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Oktober 1996, sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Sudawi (alm) dan Ibu Suprihatin.

Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sidodadi Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan. Pada Tahun 2003-2009.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sidomulyo Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan. Pada Tahun 2009- 2012.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Sidomulyo Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan. Pada Tahun 2012- 2015

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi keperguruan tinggi di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di UIN Raden Intan Lampung)".

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul “Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di UIN Raden Intan Lampung)”.

Shalawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa semua umat menuju kebahagiaan baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Penyusun skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, sebab keterlibatan sebagian pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesainya usaha penyusunan ini. Baik itu yang berupa motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril, serta spiritual. Untuk itu ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. Beserta staf dan jajaranya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Dr. H. Khairuddin, M.H Serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk meberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepala penulis.

3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), bapak Frenki, M.Si. beserta jajarannya, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I: Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H., yang penuh kesabaran dan telah menyediakan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, asisten dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan baik perpustakaan Fakultas maupun Institut, yang telah memberikan dispentasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kedua orang tua ayahanda (Sudawi (alm)) dan ibunda (Suprihatin) dan kakak-kakak serta adikku tersayang, yang turut mendo'akan, mensupport serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga dan saudara serta Mb Lin, yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
9. Mahasiswa-mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang telah bersedia menyumbangkan gagasan dan membantu penulis dalam mengisi koesioner penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya kelas c Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang telah memberikan semangat dan doa dalam skripsi ini, yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman satu kontrakan yang sudah menemani dan membantu penulis dalam menempuh pendidikan di rantau, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga besar UKMF GEM AIS yang terus mengingatkan dalam kebaikan dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT atas kebaikan selama ini, semoga menjadi amal sholeh, Aamiin.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca yang budiman umumnya, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar lampung, 29 Februari 2020

Penulis,



Salis Fitriyanti

NPM. 1621020133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	9
 BAB II KAJIAN TEORI	 17
A. Kajian Teori	17
1. Sistem Pemilihan Pemimpin	
Dalam Islam.....	17

2. Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	29
3. Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia	34
4. Syarat-syarat Pemilih Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia.....	44
B. Tinjauan Pustaka	47
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.....	49
B. Tanggapan Mahasiswa Tentang Syarat-syarat Pemilih Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia Dan Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	55
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	61
A. Analisis Terhadap Tanggapan Mahasiswa Tentang Syarat-syarat Pemilih Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia	61
B. Analisis Terhadap Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih Kepala Negara Yang Ideal Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jawaban 40 Responden terhadap Syarat-syarat Pemilih Presiden di Indonesia Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>
--



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **“Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di UIN Raden Intan Lampung)”** Untuk menghindari kesalahan pemahaman judul di atas, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain:

1. Tanggapan

Tanggapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sambutan terhadap ucapan (kritik, komentar).³

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.⁴ Secara sosiologis, mahasiswa merupakan kelompok strategis dalam masyarakat. Di negara berkembang, dalam masyarakat, posisi mahasiswa memiliki status sosial sebagai kelas menengah. Berkat peringkat sosial yang dimilikinya, bisa dikatakan, mahasiswa selalu terlibat dalam proses perubahan sosial, khususnya di bidang politik.⁵ Dalam penelitian ini mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Jurusan Siyasah Fakultas Syariah angkatan 2017 dan Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin angkatan 2017.

3. Kriteria

Kriteria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁶

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1397.

⁴ *Ibid.* h. 856.

⁵ Massa Djafar, *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi*, (Jakarta: Bumi ksara, 2015), h. 141.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*, h. 742.

4. Pilih

Pilih dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin.⁷

5. Pemilihan

Pemilihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan memilih.⁸

6. Presiden

Presiden dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pimpinan atau Kepala Negara bagi negara yang berbentuk Republik.⁹

7. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁰

8. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*, *fiqh* itu sendiri adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh setiap muslim. Sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹¹ Jadi, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai

⁷Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 198 ayat (1).

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa....*, h. 742.

⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Abadi Mahasatya, 2007), h. 370.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa....*, h.1062.

¹¹Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 4.

kemudahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.¹²

Berdasarkan penjelasan-penjelasan kalimat diatas maka makna dari judul “Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di UIN Raden Intan Lampung)” adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung sebagai kaum intelektual yang diminta memberikan tanggapannya terkait syarat-syarat pemilih Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara perspektif *fiqh siyasah*, yang kemudian akan menghasilkan kriteria pemilih Presiden yang ideal untuk dapat melahirkan Presiden yang ideal berdasarkan syarat-syaratnya.

B. Alasan Memilih Judul

Penulis memiliki beberapa alasan terkait pentingnya masalah ini untuk diteliti antara lain :

1. Alasan Objektif
 - a. Sebagai negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilu dalam memilih Presiden. Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dengan berbagai macam suku, budaya, agama, lapisan sosial, pendidikan, sampai pengetahuan. Kajian seputar kriteria pemilih dalam pemilihan Presiden perspektif *fiqh siyasah* tentunya perlu dilakukan untuk dikaji bagaimana tanggapan mahasiswa tentang syarat-syarat pemilih Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara yang ideal perspektif *fiqh siyasah*. Sehingga menghasilkan kesimpulan dari tanggapan mahasiswa tentang syarat-syarat pemilih Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara yang ideal perspektif *fiqh siyasah* agar dapat terpilihnya Presiden yang ideal berdasarkan syarat-syaratnya.

¹² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 11.

2. Alasan Subjektif

- a. Kajian terkait kriteria pemilih dalam pemilihan Presiden perspektif *fiqh siyasah* ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada Jurusan Siyasah.
- b. Berdasarkan data Jurusan belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkat sebagai judul skripsi dan studi kasus yang mudah dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk memilih Presiden. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan hal yang utama dan harus ada serta harus dilaksanakan. Sebab, pemilihan umum merupakan wujud langsung dari peran serta politik masyarakat. Sesuai dengan fungsi yang diembannya, ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya tidak membatasi keterlibatan pemilih didalam praktek pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, misalnya, ditentukan bahwa setiap warga negara yang sudah cukup dewasa mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih maupun dipilih. Pemilihan umum tidak membedakan latar belakang sosial budaya, politik, dan ekonomi dari para pemilih. Sejauh mereka sudah memenuhi persyaratan formal, tidak seorangpun berhak untuk mencabut haknya.¹³

Indonesia sebagai negara demokrasi berkewajiban untuk melaksanakan pemilihan umum. Sejak masa reformasi, rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam memilih Presiden. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung karena adanya perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” (perubahan ketiga). Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (2) sebelumnya berbunyi “Presiden dan Wakil

¹³M. Dawam Rahardjo, ed. *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*, (Jakarta: Cides, 1995), h. 61.

Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.¹⁴

Indonesia telah menyelenggarakan 4 (empat) kali pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Tahun 2004 merupakan pemilu yang pertama kalinya dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilihan Presiden tersebut, melewati dua tahapan pemilihan. Dikarenakan tidak ada pasangan yang meraih suara lebih dari 50% pada putaran pertama, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, dua pasangan teratas kemudian bersaing pada putaran kedua. Pemilu tahun 2004 ini menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla. Pemilihan Presiden tahun 2009 hanya berjalan satu putaran. Sebab, Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Boediono meraih suara signifikan dibandingkan dua pasangan lainnya. Pada tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali melakukan pesta demokrasi terbesar yaitu pemilihan Presiden. Berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU menghasilkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapatkan jumlah suara terbesar.¹⁵ Dan pemilihan Presiden tahun 2019 kembali dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo sebagai Presiden dan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden.

Berkenaan dengan syarat-syarat pemilih dalam pemilihan Presiden yang berlaku di Indonesia, yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BAB V Hak Memilih Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Ayat (2) yang berbunyi “Warga Negara Indonesia sebagai dimaksud pada ayat (1) terdaftar

¹⁴Undang-Undang Dasar 1945 BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 6A ayat (1).

¹⁵Yahya Mulyana Aziz, Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 134-136.

oleh penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih. Dan Pasal 28 yang berbunyi “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.”¹⁶

Pada masa Nabi Muhammad *shalallahhu alayhi wa sallam*, ketika di Madinah Nabi menciptakan suatu kekuatan sosial-politik di dalam sebuah negara Madinah. Di negara baru ini juga Nabi Muhammad *shalallahhu alayhi wa sallam* bertindak sebagai Kepala Negara dengan piagam Madinah sebagai konstitusinya.¹⁷

Pada masa *khulafaur ar-rasyidin*, Abu Bakar sebagai *khalifah* pertama dipilih secara aklamasi. Kemudian Umar Bin Khaththab sebagai *khalifah* kedua dipilih karena wasiat dari *khalifah* terdahulu. Sedangkan pengangkatan Ustman Bin Affan yaitu dengan cara dibentuknya dewan formatur yang di buat oleh *khalifah* sebelumnya. Dan Ali Bin Abi Thalib diangkat sebagai *khalifah* karena adanya kekosongan kepemimpinan dikarenakan terbunuhnya Utsman Bin Affan. Setelah masa *khulafaur ar-rasyidin* selesai memerintah, sistem pemilihan Kepala Negara berganti menjadi garis keturunan.

Salah satu tokoh *siyasah* Al-Mawardi berpendapat, Kepala Negara merupakan lingkup garapan *khalifah* kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Dan membaiait orang yang melaksanakan kekhalifahan adalah wajib menurut Islam.¹⁸ Mengingat pentingnya mengangkat Kepala Negara, maka Al-Mawardi membentuk dua kelompok: *Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (*khalifah*) untuk umat. *Kedua*, kelompok *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah satu dari mereka sebagai imam (*khalifah*).¹⁹

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BAB V Hak Memilih Pasal 27 ayat (1), (2) dan pasal 28.

¹⁷Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, h. 37.

¹⁸Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 267.

¹⁹Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 10.

Kaitannya dengan kriteria pemilih dalam pemilihan Kepala Negara dalam Islam. Al-Mawardi mengungkapkan syarat-syarat legal untuk pemilih agar terpilihnya Kepala Negara yang ideal, yaitu:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (*khalifah*) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.²⁰

Fiqh siyasah mengungkapkan bahwasannya dalam pemilihan pemimpin tidak hanya dilihat calon pemimpinnya saja, melainkan yang memilih pun harus dipertimbangkan. Artinya, tidak sembarangan orang dapat memilih pemimpin dikarenakan tidak semua orang juga memiliki pengetahuan tentang syarat-syarat orang yang berhak diangkat sebagai pemimpin dan juga tidak semua orang mempunyai sikap bijaksana dalam menentukan siapa yang paling layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Berdasarkan kriteria pemilih tersebut diharapkan terpilihnya seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya, mampu memimpin dengan baik, mengayomi, melindungi, dan menjamin keamanan serta kesejahteraan rakyat.

Berkenaan dengan kriteria pemilih Presiden tersebut, diharapkan mahasiswa sebagai kaum intelektual dapat memahami syarat-syarat pemilih Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara perspektif *fiqh siyasah*. Serta dapat memberikan tanggapan tentang syarat-syarat pemilih dalam pemilihan Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Presiden yang ideal perspektif *fiqh siyasah* agar dapat terpilihnya Presiden yang ideal berdasarkan syarat-syaratnya.

Mengingat mahasiswa merupakan kelompok strategis dalam masyarakat. Artinya kecenderungan dalam menguatkan dan mengembangkan hasil pengambilalihan di masyarakat. Dinegara berkembang didalam masyarakat, posisi mahasiswa memiliki status sosial sebagai kelas menengah. Berkat

²⁰*Ibid.* h. 11.

peringkat sosial yang dimilikinya, bisa dikatakan mahasiswa selalu terlibat dalam proses perubahan sosial, khususnya dengan politik.²¹

Gerakan mahasiswa dalam kancah politik tidak pernah pudar. Secara ideologis, perjuangan mahasiswa tidak pernah berhenti, hal ini sudah terjadi sejak gerakan nasional pada masa kolonial. Partisipasi mahasiswa selalu hadir untuk membela kepentingan rakyat. Mereka mengontrol dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan, kelompok mahasiswa juga memainkan perannya pada masa-masa krisis politik dan ekonomi, seperti yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Soekarno 1967 dan pemerintahan Soeharto 1998.²²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perlu penelitian lebih lanjut mengenai kriteria pemilih dalam memilih Presiden, maka penulis mengambil judul **“Tanggapan Mahasiswa Tentang Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di UIN Raden Intan Lampung).”**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada BAB IV analisis tanggapan mahasiswa terhadap syarat-syarat pemilih dalam pemilihan Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara yang ideal perspektif *Fiqh Siyasah* agar terpilihnya Presiden yang ideal berdasarkan syarat-syaratnya.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tanggapan mahasiswa tentang syarat-syarat pemilih dalam pemilihan Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana tanggapan mahasiswa tentang kriteria pemilih Kepala Negara yang ideal perspektif *fiqh siyasah*?

²¹Massa Djafar, *Krisis Politik dan Proposisi*, h. 141.

²²*Ibid.*

F. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji kebenaran dari suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa tentang syarat-syarat pemilihan Presiden di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa tentang kriteria pemilihan Kepala Negara yang ideal perspektif *fiqh siyasah* agar dapat terpilihnya Presiden yang ideal berdasarkan syarat-syaratnya.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam studi Islam khususnya mengenai kriteria pemilihan Presiden agar dapat terpilihnya Presiden yang ideal berdasarkan syarat-syarat yang legal.
2. Secara praktis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah kriteria pemilihan dalam pemilihan Presiden.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.²³ Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.²⁴

b. Sifat Penelitian

²³Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 21.

²⁴*Ibid.* h. 12.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang di dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa terhadap tanggapan mahasiswa tentang syarat-syarat pemilih dalam pemilihan Presiden di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara yang ideal menurut *fiqh siyasah* agar dapat terpilihnya Presiden yang ideal berdasarkan syarat-syaratnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang di peroleh dari lapangan dengan cara wawancara.²⁵ Data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari *kuesioner* (angket).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan.

c. Data Tersier

Merupakan data pelengkap dari kedua data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

²⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi (sasaran) penelitian

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap.²⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017 yang menurut data berjumlah 334 mahasiswa. Serta mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2017 yang menurut data berjumlah 63 mahasiswa. Karena dinilai mempunyai dalam masalah yang sedang diteliti. Jadi jumlah keseluruhan populasi adalah 397 mahasiswa.

b. Sampel dan teknik sampling

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁷ Karena populasi pada penelitian ini heterogen yang melibatkan 2 (dua) Fakultas dan 2 (dua) Jurusan yang berbeda maka teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel acak distratifikasi (*stratified random sampling*) yaitu dengan membagi populasi dalam lapisan-lapisan (*strata*) yang beragam sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Setelah populasi dibagi ke dalam subpopulasi, maka dibuat kerangka sampel untuk masing-masing subpopulasi. Kemudian sampel akan diambil secara acak. Besarnya sampel yang diambil dari tiap-tiap subpopulasi dapat berimbang, unsur-unsur satuan yang diambil dari tiap-tiap subpopulasi berbanding lurus dengan jumlah subpopulasi.²⁸

²⁶Susiadi, *Metodologi....*, h. 120.

²⁷*Ibid.*

²⁸Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 162.

Dalam pengambilan jumlah sampel pada penelitian ini, peneliti berpedoman pada teori Suharsimi Arikunto yang menyatakan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya termasuk penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat menggunakan sampel. Menurut Suharsimi Arikunto sampel diambil antara 10% -15% hingga 20% - 25% atau boleh lebih dari 25% dari jumlah populasi yang ada.²⁹

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan data jumlah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017 dan Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2017 berjumlah 397 mahasiswa. Berdasarkan teknik sampel acak distratifikasi diatas, maka populasi akan dibagi dalam subpopulasi diantaranya Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017 yang berjumlah 334 mahasiswa yang akan diambil adalah $10\% \times 334 \text{ mahasiswa} = 33 \text{ mahasiswa}$. Dan Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2017 yang berjumlah 63 mahasiswa yang akan diambil adalah $10\% \times 63 \text{ mahasiswa} = 7 \text{ mahasiswa}$. Jadi, sampel yang diperoleh dari jumlah populasi adalah 40 mahasiswa. Yang terdiri dari 33 mahasiswa dari Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017 dan 7 mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2017. Penentuan sampel yang berjumlah 40 mahasiswa dari 397 jumlah keseluruhan populasi menggunakan teknik *proposive sampling* yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada dalam populasi dijadikan kunci untuk mengambil sampel.³⁰

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 32.

³⁰ Susiadi, *Metodologi....*, h. 130.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Metode *Kuesioner* (Angket)

Kuesioner (Angket) adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Pertanyaan akan diisi oleh responden yaitu mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017 dan Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung. Penulis menggunakan jenis angket semi terbuka yaitu angket yang pertanyaannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban yang telah disediakan. Dan selanjutnya menggunakan jenis angket terbuka yang pertanyaannya memberikan jawaban dan pendapat sesuai dengan keinginan responden.³¹

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³²

Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017 dan Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.³³

³¹ *Ibid.* h.137.

³² *Ibid.* h.158.

³³ *Ibid.* h. 170.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.³⁴

Koding, yaitu mengklarifikasi jawaban-jawaban dari para responden kedalam katagori-katagori.

Tabulasi, yaitu pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode katagori jawaban kemudian dimasukan dalam tabel.³⁵

Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁶

Berdasarkan pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumasan masalah.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti. Analisa deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.³⁷

Penelitian ini dilakukan dengan memaparkan informasi-informasi yang didapat dari mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017 dan Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2017 UIN Raden Intan Lampung yang berkaitan dengan kriteria pemilih dalam pemilihan Presiden

³⁴ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

³⁵ Susiadi, *Metodologi....*, h. 184.

³⁶ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode....*, h. 107.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, h. 282.

di Indonesia dan kriteria pemilih Kepala Negara yang ideal perspektif *fiqh siyasah*. Kemudian mengevaluasi dengan teori-teori yang terkait terhadap penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Sistem Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Lembaga negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan Kepala Negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut *ijma'*. Kewajibannya adalah wajib *kifayah*, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan. Jika ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten, maka kewajiban itu gugur atas orang lain dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya, maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama, adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat Islam. Kedua, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan ini.

Orang yang berhak dicalonkan sebagai Kepala Negara harus memiliki tujuh syarat sebagai berikut:

- a. Keseimbangan (*al-adalah*) yang memenuhi semua kriteria.
- b. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan *ijtihad* untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
- c. Panca inderanya lengkap dan sehat, sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya.
- d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
- e. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

- f. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.³⁸

Al-Qur'an surah As-Sajdah (32):24 menyebutkan pemimpin yang baik ialah pemimpin yang tetap sabar dalam menegakkan kebenaran.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ



Artinya:

*“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.”*³⁹

Tugas-tugas yang harus di emban oleh Kepala Negara adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan.
- b. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antara pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.
- c. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
- d. Menjalankan hukum *had* sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.

³⁸ Mujaar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin*..., h. 64.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nusul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009), h. 417.

- e. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakakan rakyat.
- f. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau masuk dalam jaminan Islam.
- g. Menarik *fai'* dan memungut *zakat* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara jelas dalam *nash* dan *ijtihad*.
- h. Menentukan gaji dan besarnya pemberian kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari *baitul mal*, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktu, tidak lebih dahulu dari waktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waktunya.
- i. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang berkompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada dibawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang terpercaya.
- j. Agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas untuk memangku jabatan tersebut. Maka merupakan kewajiban bagi yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum muslimin kepada seseorang, untuk menugaskan kepada orang yang di tangannya memenuhi kelengkapan kriteria, yakni orang yang paling mampu mengemban tugas, dan tidak

menyerahkannya kepada seseorang yang meminta kedudukan atau yang mengajukan diri meminta kedudukan.⁴⁰

Al-Qur'an surat An-Nisa (4):59 terdapat isyarat tentang pentingnya mengangkat seorang Kepala Negara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴¹

Pentingnya mengangkat seorang Kepala Negara, juga didasarkan hadis Nabi. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا
كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ⁴²

⁴⁰ Mular Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin*...., h. 65.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*...., h. 87.

⁴² Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadi Abu ath-Thayyib, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), h. 191-192.

Dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda : “*Apabila ada tiga orang bepergian hendaklah mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin rombongan.*” (HR. Abu Dawud).⁴³

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 59 dan hadis riwayat Abu Dawud tersebut, dapat dipahami bahwa jabatan Kepala Negara itu tidak boleh dibiarkan vakum, meskipun hanya satu hari sekalipun. Kesadaran tentang betapa perlunya kehadiran seorang pemimpin secara *kontinu* inilah, agaknya yang menyebabkan mengapa beberapa orang sahabat senior dari kalangan Anshar, utamanya Basyir Ibn Sa'ad dan Asid Ibn Khudair ditambah Umar dan Abu Bakar dari kalangan Muhajirin yang berkumpul di Tasqifah Bani Sa'idah pada hari kedua setelah Nabi wafat, lebih mendahulukan pengangkatan *khalifah* pengganti Nabi ketimbang mengurus upacara pemakaman beliau.⁴⁴

Mengenai mekanisme pemilihan Kepala Negara baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang Kepala Negara. Karena itu, dalam pentas sejarah ketatanegaraan Islam muncul berbagai model atau cara pengangkatan Kepala Negara Islam, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis dan didahului sebuah peperangan atau revolusi bedarah.⁴⁵

Metode penunjukan langsung oleh Allah, menurut al-Maududi, terjadi pada Kepala Negara Islam pertama, yakni Nabi Muhammad Saw. Sewaktu di Mekkah, Nabi Muhammad Saw hanya berkedudukan sebagai kepala agama saja. Setelah hijrah ke Madinah beliau tidak hanya diakui sebagai pemimpin agama, tapi juga menjadi dan diakui sebagai Kepala Negara pertamanya. Sebagai Kepala Negara Madinah, menurut al-Maududi, Nabi sama sekali tidak dipilih oleh siapapun, tapi ia dipilih langsung oleh Allah Yang Maha Kuasa sendiri.

⁴³ Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, terjemahan Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 96.

⁴⁴ Mujaar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin*..., h. 105.

⁴⁵ *Ibid*, h. 124.

Menurut Prof. Ahmad Sukardja menyatakan, sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Saw memang dipilih langsung oleh Allah SWT, tetapi sebagai Kepala Negara beliau dipilih oleh para pemuka masyarakat Madinah. Proses pemilihan memang mempunyai kualitas yang unik, yaitu pemegang risalah di samping pemimpin masyarakat politik. Islam mengajarkan syahadat dan membenarkan eksistensi *baiat*. Syahadat bersifat religius. Ia berisi pengakuan adanya Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Didalamnya terkandung kesediaan dan tekad untuk mematuhi Allah dan Rasul selaku pengemban risalah. *Baiat* lebih bersifat keduniaan. Ia merupakan lembaga perjanjian antar sesama manusia. Isinya dapat berupa kemauan timbak-balik dan kesepakatan politik.⁴⁶

Terpilihnya Abu Bakar sebagai *khalifah* pertama di Saqifah Bani Sa'idah adalah hasil musyawarah para sahabat senior yang meyakini *khalifah* atau pengganti Nabi harus dipilih berdasarkan musyawarah. Argumentasi pemilihan Abu Bakar dibangun berdasarkan *qiyas* atau analogi, bukan berdasarkan *nash*. Abu Bakar, menurut Umar, selalu diminta oleh Nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam shalat bilamana Nabi sakit. Di samping itu, kata Umar, Abu Bakar adalah sahabat yang paling disayangi oleh Nabi.

Berdasarkan logika Umar, Abu Bakar mendapatkan ridha Nabi untuk menjadi pemimpin shalat, maka tentu Nabi juga ridha bila Abu Bakar menjadi pemimpin/Kepala Negara umat Islam sepeninggal beliau. Setuju dengan logika Umar tersebut segenap sahabat, baik dari kelompok Muhajirin maupun Anshar akhirnya sepakat membaiat Abu Bakar sebagai *khalifah* pertama menggantikan Nabi yang telah wafat.⁴⁷

Umar ibn Khattab sebagai *khalifah* kedua, memegang jabatan *khalifah* melalui metode penunjukan oleh Abu Bakar melalui wasiat.⁴⁸ Karena Abu Bakar merasa sakitnya semakin parah, dan kemungkinan ajalnya sudah semakin dekat, Abu Bakar merasa perlu memberikan

⁴⁶ *Ibid*, h. 125.

⁴⁷ *Ibid*, h. 135.

⁴⁸ *Ibid*, h. 144.

wasiat tentang penggantinya kelak. Maka Abu Bakar menetapkan Umar ibn al-Khattab sebagai *khalifah*. Dalam penetapan ini, Abu Bakar tetap melaksanakan musyawarah dengan sahabat-sahabat lainnya. Di antara sahabat yang diajak musyawarah adalah Abd al-Rahman ibn Awf dan Usman ibn Affan serta Asid ibn Khudaid. Pada prinsipnya sahabat-sahabat tersebut setuju dengan pilihan Abu Bakar. Hanya saja Abd al-Rahman mengingatkan bahwa Umar terlalu keras. Dengan bijaksana Abu Bakar menjawab bahwa sikap keras tersebut karena Umar melihat sifat Abu Bakar yang lemah lembut. Kelak setelah menjadi *khalifah* Umar pun bisa menjadi lemah lembut.

Setelah bermusyawarah dengan tiga tokoh sahabat tersebut, Abu Bakar meminta Usman untuk menuliskan pesan tentang penunjukan Umar sebagai penggantinya. Belum selesai mendiktekan topiknya, tiba-tiba Abu Bakar jatuh pingsan. Usman yang sudah mengerti maksud dan isi yang akan disampaikan Abu Bakar, terus saja menulis wasiat tersebut. Setelah siuman, Abu Bakar menanyakan isi wasiat yang telah ditulis Usman. Mendengar apa yang dibaca Usman sesuai dengan pesannya, Abu Bakar puas dan bertakbir serta berterima kasih kepada Usman.

Abu Bakar kemudian menemui umat Islam yang berkumpul di masjid dan menyampaikan keputusannya memilih Umar. Selanjutnya Abu Bakar memanggil Umar dan membekalinya dengan beberapa pesan. Setelah itu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan berdo'a, "Ya Allah, aku hanya menginginkan kemaslahatan bagi mereka. Aku sangat khawatir akan perpecahan (yang menimpa mereka). Aku telah berbuat sesuatu untuk mereka di mana Engkau lebih mengetahuinya. Aku telah melakukan *ijtihad* dalam masalah ini dengan menunjuk pemimpin mereka yang kuat dan mampu membawa kepada kebaikan. Berilah kemaslahatan kepada mereka dan jadikanlah ia sebagai pemimpin yang

terpuji. Umar pun dibaiaat secara umum oleh umat Islam di Masjid Nabawai”.⁴⁹

Khalifah ketiga, Usman ibn Affan menduduki tahta *khalifah* melalui metode pemilihan oleh tim formatur atau dewan musyawarah.⁵⁰ Penunjukan Usman oleh tim formatur yang mana-namanya telah ditentukan Umar sebelum dia wafat, yang terdiri dari enam orang sahabat senior, yakni Ali, Usman ibn Affan, Sa’ad ibn Abu Waqas, Abd al-Rahman ibn Auf, Zubair ibn Awwam, Thalhah ibn Ubaidillah, dan putra Umar sendiri, Abdullah ibn Umar. Namun Umar menggarisbawahi bahwa putranya tidak boleh dipilih. Ketua tim formatur itu adalah Abd al-Rahman ibn Auf. Disamping itu Umar juga menjelaskan “aturan main” pemilihan *khalifah*. Umar berpesan bahwa bila lima atau empat orang sepakat memilih seorang untuk menjadi *khalifah* dan satu atau dua orang membangkang, maka yang membangkang tersebut harus dipenggal lehernya. Kalau suara berimbang 3:3, maka keputusan akan diserahkan kepada Abdullah ibn Umar. Tapi kalau keputusan Abdullah ibn Umar juga tidak disepakati, maka yang menjadi *khalifah* adalah calon yang dipilih oleh kelompok Abd al-Rahman ibn Auf. Kalau ini tidak disetujui juga, penggal saja leher yang membangkang tersebut.⁵¹

Setelah Umar wafat dan dimakamkan, mulailah tim formatur mengadakan musyawarah. Thalhah tidak ikut karena tidak berada di Madinah. Sejak awal, jalannya musyawarah ini benar-benar alot dan ketat. Masing-masing ingin menduduki jabatan *khalifah*. Abd al-Rahman ibn Auf menawarkan agar ada di antara anggota musyawarah yang mengundurkan diri, namun tak ada seorang pun yang bersedia. Akhirnya Abd al-Rahman sendiri yang memulainya. Setelah itu, Abd al-Rahman “melobi” anggota lainnya. Ia menanyakan kepada Usman tentang siapa yang pantas menjadi *khalifah*, seandainya ia tidak terpilih. Usman menjawab Ali. Lalu pertanyaan yang sama di tanyakan kepada Zubeir

⁴⁹ Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, h. 62.

⁵⁰ Mujaar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin....*, h. 145.

⁵¹ Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, h. 74.

dan Sa'ad secara terpisah. Keduanya menjawab Usman. Ketika Ali disodorkan pertanyaan yang sama, jawaban yang diberikan juga adalah Usman.

Dari jawaban-jawaban tersebut dapat ditarik polarisasi kekuatan, yaitu Ali dan Usman. Selanjutnya Abd al-Rahman memanggil Ali dan menanyakan seandainya ia terpilih menjadi *khalifah*, sanggupkah ia melaksanakan tugas berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah serta kebijaksanaan Abu Bakar dan Umar sebelumnya. Ali hanya menjawab bahwa ia berharap dapat menjalankannya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya. Setelah itu, Abd al-Rahman memanggil Usman dan menyodorkan pertanyaan serupa. Usman menjawab "Ya sanggup". Dan akhirnya Usman pun dibaiat menjadi *khalifah* ketiga dalam usia 70 tahun.⁵²

Karena pemerintahan Usman yang semakin kacau maka terjadi pemberontakan dimana-mana yang mengakibatkan terbunuhnya *khalifah* ketiga, Usman ibn Affan. Setelah pembunuhan Usman, para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah, Zubeir dan Sa'ad ibn Abi Wqqash untuk dibaiat menjadi *khalifah*. Namun di antara mereka tidak ada yang bersedia. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Pada awalnya pun Ali tidak bersedia, karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk Madinah dan veteran perang Badr. Menurutny, orang yang didukung oleh komunitas inilah yang lebih berhak menjadi *khalifah*. Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha'i melakukan *baiat* dan diikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubeir.

Pasca pembunuhan Usman, suasana memang begitu kacau. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Tidak semua umat Islam melakukan *baiat* kepada Ali. Di Syam, Mu'awiyah yang masih keluarga Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman. Ia menuduh Ali berada di belakang kaum pemberontak. Perlawanan Mu'awiyah ini

⁵² *Ibid*, h. 75.

bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai *khalifah* tandingan di Syam. Ia bahkan mengarahkan tentaranya untuk memerangi Ali. Adapun di Mekkah, Aisyah menggalang kekuatan pula bersama Thalhah dan Zubeir untuk melawan Ali. Namun demikian, Ali tetap dianggap sah menduduki jabatan *khalifah*, karena didukung oleh sebagian besar rakyat.⁵³

Sama seperti Ali, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan yaitu Raja Dinasti Umayyah yang pertama, juga naik tahta melalui peristiwa kudeta atau revolusi berdarah yang didahului oleh perang saudara antara tentara Ali yang mewakili pemerintahan yang sah dengan kaum pemberontak yang dipimpin oleh Mu'awiyah sendiri.⁵⁴

Pada pemerintahan Ali, sebenarnya dalam mengatasi berbagai persoalan yang melilitnya, beberapa sahabat pernah memberikan masukan-masukan kepadanya. Tapi Ali menolak pendapat mereka dan terlalu yakin dengan pendiriannya. Dalam masalah pemecatan Gubernur misalnya, Mughirah ibn Syu'bah, Ibn Abbas dan Ziyad ibn Hansalah menasihatkan Ali mereka tidak usah dipecat selama menunjukkan kesetiaan kepada Ali. Pemecatan ini akan membawa dampak yang besar bagi resistensi mereka terhadap Ali, namun Ali tetap bersikukuh pada pendiriannya. Demikian juga dengan pemecatan Mu'awiyah. Sahabat Ibn Abbas mengingatkan bahwa Mu'awiyah adalah politikus ulung yang memiliki sifat lemah lembut terhadap rakyat. Apalagi Mu'awiyah telah berkuasa di Syam sejak kekhalifahan Umar. Ibn Abbas menasihatkan, jika engkau memecat Mu'awiyah, dia akan menikammu mengambil jabatan *khalifah* bukan dari musyawarah, melainkan dari pembunuhan Usman. Ini akan membuat rakyat Syam dan Irak yang telah digenggamnya datang menuntut hak atas darah Usman. Dalam masalah Thalhah dan Zubeir, Mughirah juga menasihatkan Ali agar menjadikan mereka berdua sebagai Gubernur Kufah dan Bashrah.

⁵³ *Ibid*, h. 85.

⁵⁴ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin*...., h. 145.

Ali pun mengabaikan usulan ini, sehingga Thalhah dan Zubeir kecewa dan berakhir dengan tragedi perang berunta.

Setelah Ali tewas terbunuh, pengikut-pengikutnya mengangkat Hasan ibn Ali menjadi *khalifah* di Kufah. Sementara di Syam, kedudukan Mu'awiyah pun semakin kukuh didukung oleh penduduknya. Hasan pun bukanlah lawan yang berat bagi Mu'awiyah. Hasan yang lemah dipaksa untuk mengundurkan diri dan membuat perjanjian damai dengan Mu'awiyah. Hasan pun melakukan *baiat* terhadap Mu'awiyah pada tahun 41 H/661 M dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam.⁵⁵

Sebagai administrator yang ulung dan politikus yang cerdas, Mu'awiyah memainkan peranannya memimpin dunia Islam yang luas. Ia merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah dipecat oleh Ali. Yang dirasa memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setelah merasa aman, mulailah Mu'awiyah membenahi negara dan melakukan berbagai kebijakan politik.⁵⁶

Bani Umayyah yang pertama kali dalam Islam mempraktikkan pengisian jabatan Kepala Negara menggunakan sistem monarki yaitu berdasarkan garis keturunan. Ketika Ibn Abi Sufyan, atas usul Muhgirah ibn Syu'bah, Gubernur Kuffah kala itu, menunjuk putranya, Yazid ibn Mu'awiyah, sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya sebagai *khalifah*. Sistem monarki yang dirintis oleh Mu'awiyah itu, terus dilestarikan secara turun temurun oleh *khalifah-khalifah* sesudahnya.⁵⁷

Runtuhnya dinasti Bani Umayyah dipelapori oleh faktor internal yaitu, kebijakan-kebijakan yang di buat oleh penguasa cenderung semakin kacau dan tidak berpihak pada rakyat. Dalam faktor eksternal, gangguan-gangguan dari gerakan oposisi juga turut memperlemah kerajaan ini. Di antara yang paling berbahaya adalah gerakan Khawarij di Oman, Syi'ah di Kufah dan Adullah ibn Zubeir yang mendapat dukungan dari penduduk Hijaz, Yaman, Irak, dan Iran. Gerakan-gerakan oposisi ini

⁵⁵ Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, h. 89.

⁵⁶ *Ibid*, h. 90.

⁵⁷ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin....*, h. 146.

kecewa dengan cara-cara licik Mu'awiyah dalam mencapai puncak kariernya sebagai *khalifah*. Gerakan-gerakan oposisi tersebut terus menggerogoti daulat Bani Umayyah, hingga melemahkan kerajaan itu.

Akhirnya pada tahun 133 H/ 750 M revolusi Bani Abbas berhasil menghancurkan kekhalifahan Umayyah. Peta politik umat Islam pun berganti dan dikuasai kembali oleh keluarga Bani Abbas. Abu Ja'far al-Mansyur adalah *khalifah* pertama Abbasiyah setelah kemenangannya dari Umayyah. Sistem pergantian Kepala Negara Abbasiyah sama persis seperti Umayyah, yaitu sistem monarki atau keturunan.⁵⁸

Munculnya Dinasti Utsmani di Turki pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah. Fragmentasi itu semakin menjadi sejak abad IX Masehi. Dinasti Utsmani berkuasa secara meluas di Asia Kecil sejak kemunculan pendirinya, yaitu Utsman I (1299-1326 M) pada tahun 1306 M. Ia dan keturunannya berkuasa sampai tahun 1922 M. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai *Padisya Al-Utsman* (raja besar keluarga Utsman) pada tahun 699 H (1300M), Setapak demi setapak wilayah kesultanan dapat diperluas. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broessa pada tahun 1317 M. Setelah itu, pada tahun 1326 M kota tersebut dijadikan sebagai ibu kota Kesultanan Turki Utsmani.⁵⁹ Corak sistem kepemimpinan Dinasti Utsmani yaitu Monarki atau turun temurun, namun kekuasaannya tidak mesti diturunkan pada anak Sultan sebelumnya. Selama masih ada hubungan darah, maka dapat diberikan mandat Sultan tersebut.

2. Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut *Fiqh Siyasah*

Sistem politik Islam menggunakan prinsip *syura* (musyawarah) dalam sirkulasi kekuasaan. *Syura* merupakan sendi kehidupan

⁵⁸ Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, h. 97.

⁵⁹ Samsul Munir Amin, *Sejarah Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 138.

bermasyarakat dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. *Syura* adalah prinsip yang menegaskan bahwa sirkulasi kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, lembaga permusyawaratan yang perlu dibentuk, cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya diserahkan kepada kelompok manusia bersangkutan untuk mengaturnya. Jadi sebagai prinsip, musyawarah adalah syariat. Pemahamannya termasuk bidang *fiqh* dan pengaturannya termasuk *siyasah syar'iyah*.⁶⁰

Syura ialah mengeluarkan berbagai pendapat tentang suatu masalah untuk dikaji dan diketahui berbagai aspeknya sehingga dapat dicapai kebaikan dan dihindari kesalahan. Prinsip *syura* merupakan bagian integral fitrah manusia sejak Allah menciptakannya. Sifat *syura* ini nampak dengan jelas dalam gerak manusia, baik secara individu maupun kelompok. Orang yang berfikiran baik tidak akan melakukan sesuatu yang penting kecuali setelah bertanya dan meminta pendapat orang yang terpercaya mengenai masalah tersebut. Sebagaimana hakim yang bijaksana tentu memiliki majlis atau dewan penasihat bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya.⁶¹

Al-Qur'an Surah Asy-Syura (42):38 menjadi landasan dari hak memilih melalui prinsip *Syura*.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

⁶⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 158.

⁶¹ Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin: Telaah Sistem Jama'ah Dalam Gerakan Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 70.

*musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”*⁶²

Menurut Al-Mawardi dalam mengangkat Kepala Negara dengan sistem pemilihan, kelompok pemilih tersebut disebut dengan *Ahl-ikhtiyar*. *Ahl-ikhtiyar* dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Negara untuk mengatur masyarakat, termasuk mereka sendiri. Tidak setiap anggota masyarakat berhak untuk menjadi pemilih Kepala Negara.⁶³

Bagi kelompok pemilih ini memiliki syarat legal, yaitu:

- a. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya. Dalam arti harus mempunyai integritas moral yang baik dan telah menjalankan agamanya dengan baik pula.
- b. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam/*khalifah* sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
- c. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan. Artinya, harus mengetahui sosok dan kualitas pemimpin yang bagaimana yang diperlukan pada masanya.⁶⁴

Persyaratan-persyaratan yang diberikan untuk kelompok pemilih tersebut diharapkan akan terwujudnya Kepala Negara yang cakap, terampil dan mengetahui mana yang harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, hanya manusia yang berkualitaslah yang berhak menjadi kelompok pemilih Kepala Negara.⁶⁵

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*..., h. 487.

⁶³ Mular Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin*..., h. 154.

⁶⁴ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*..., h. 11.

⁶⁵ Mular Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin*..., h. 154.

Kelompok ini lazim juga disebut *ahl al-halli wa al-aqdi*. *Ahl al-halli wa al-aqdi* merupakan lembaga negara yang mewadahi sekelompok orang yang memiliki kualifikasi untuk menempati lembaga musyawarah. Yaitu orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk bertindak atas nama umat Islam dalam memilih seorang *khalifah*.⁶⁶ Mereka sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. *Ahl al-halli wa al-aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.⁶⁷

Sedangkan menurut Rasyid Ridla berkaitan dengan kriteria pemilihan ini telah berkata, “Demikianlah, di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan *ahlu syura* atau *ahl al-hall wa al-aqd* di dalam Islam. Pengangkatan *khalifah* tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta membaiaatnya dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya.”⁶⁸

Menurut al-Maududi kelompok pemilihan itu sudah ada sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang yang dipandang sebagai kelompok pemilihan ini terdiri dari dua kelompok yaitu orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah sejak permulaan sekali dan orang-orang yang kemudian menjadi terkemuka karena wawasan dan kemampuan mereka.

Pasca *hijrah* Nabi ke Madinah, belakangan dalam masyarakat Madinah, dua kelompok orang yang terkemuka. Kelompok pertama adalah orang-orang yang karena selama delapan sampai sepuluh tahun

⁶⁶ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 137.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, h. 159.

⁶⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 75-76.

mengabdikan di bidang politik, militer, dan misi Islam sedemikian rupa, maka praktis dalam semua masalah orang memandang mereka. Kelompok kedua adalah orang-orang yang secara perlahan menjadi terkemuka karena wawasan luas dan pengetahuan mendalam mereka dalam yurisprudensi serta literatur Al-Qur'an. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, secara alamiah rakyat menganggap mereka sebagai orang-orang yang paling diandalkan dalam masalah-masalah tersebut. Di masa *khulafaur ar-rasyidin* kedua kelompok orang tersebut juga terpilih melalui proses alamiah. Oleh karenanya, tegas al-Maududi, tidak perlu dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih mereka, sebab walaupun pemilihan umum dilaksanakan, maka kedua kelompok inilah yang pasti akan terpilih.

Setelah *ahl al-ikhtiyar* terbentuk maka mereka mengadakan penelitian terhadap calon Kepala Negara. Penelitian itu berupa pemenuhan syarat-syarat untuk menjadi Kepala Negara. Jika persyaratan-persyaratan itu telah dipenuhi oleh calon yang lebih dari satu, maka diadakan seleksi lebih lanjut, siapa di antara mereka yang lebih layak dan lebih dapat diterima oleh orang banyak.⁶⁹

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Ibn Taimiyah menolak pengangkatan Kepala Negara oleh *ahl al-hall wa al-aqd*. Bahkan ia menolak keberadaan *ahl al-hall wa al-aqd*. Menurutnya, dalam praktiknya pada pasca *khulafaur ar-rasyidin*, *ahl al-hall wa al-aqd* hanyalah menjadi semacam lembaga legitimasi bagi kekuasaan *khalifah* Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena mereka diangkat oleh *khalifah*. Akibatnya, *ahl al-hall wa al-aqd* tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan Kepala Negara. *Ahl al-hall wa al-aqd* tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Bagaimana mungkin ia menjadi wakil rakyat jika yang menentukan keberadaannya adalah Kepala Negara. Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana dikutip Qomaruddin Khan, istilah

⁶⁹ *Ibid*, h. 155-156.

ahl al-hall wa al-aqd tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi populer hanya setelah Bani Abbas berkuasa. Ibn Taimiyah bahkan meragukan bahwa konsep *ahl al-hall wa al-aqd* akan mengarah kepada terbentuknya lembaga kependetaan dalam Islam dan melahirkan doktrin kemaksuman imam, seperti pandangan Syi'ah. Konsekuensinya lebih jauh, doktrin ini akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih.

Sebagai alternatif, Ibn Taimiyah mengembangkan konsep *al-syawkah* dalam teori politiknya. Menurutnya *al-syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan yang kedudukannya dihormati di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapannya menjadi kata putus bagi masyarakat.⁷⁰

Penyebutan *ahl-ikhtiyar*, *ahl al-halli wa al-aqdi*, *ahlu syura*, ataupun *al-syawkah* bagi kelompok pemilih Kepala Negara semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kompetensi yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.⁷¹

3. Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia

Tanggal 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia dan Wakil Presiden Mohammad Hatta terpilih melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tepat satu hari setelah beliau menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.⁷² Bahkan pihak lembaga legislatif menyatakan bahwa Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup.⁷³

⁷⁰ Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, h. 161-162.

⁷¹ *Ibid*, h. 159.

⁷² Indrāja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia". *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1 (Januari 2018), h. 65.

⁷³ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 344.

Terpilihnya Soeharto menjadi Presiden RI karena adanya supersemar yang turun kepadanya dari Presiden Soekarno dan juga atas ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, lalu Soeharto pun diangkat menjadi Presiden terpilih melalui pemilihan Presiden dengan dasar hukum Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden. Pada masa-masa orde baru, pemilihan Presiden dilakukan dalam forum Sidang Umum MPR pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dan yang mempunyai hak suara untuk memilih Presiden hanyalah anggota MPR. Dikarenakan anggota MPR berasal dari Fraksi Golkar dan ABRI yang merupakan penyokong utama kekuasaan Soeharto, maka Soeharto pun selalu terpilih secara aklamasi dalam setiap pemilihan Presiden yang ia ikuti. Selain itu, pada masa tersebut Undang-Undang Dasar tidak memberikan batasan periode seseorang berhak menjadi Presiden. Kolaborasi dari dua hal inilah yang membuat kekuasaan Soeharto mencengkram kuat Republik ini selama puluhan tahun. Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”.

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai Presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak kontra menganggap pengangkatan Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie terjadi perubahan ketetapan MPR.

Untuk mengatasi krisis politik berkepanjangan, maka diadakan sidang istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998.⁷⁴

Pemilihan umum (pemilu) merupakan kondisi paling penting dalam proses reformasi dan lewat pemilu tahun 1999 diharapkan dapat dijangkau aspirasi yang selama ini terjadi sekaligus membentuk pemerintahan yang diterima rakyat. Pemilu 1999 dijadikan pemilu pencerahan, melalui Undang-Undang No 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Undang-Undang No 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang menjamin rakyat menikmati *positive freedom* atau kebebasan yang memiliki hak kuasa atas tindakannya. Selain adanya indikasi sangat kuat bahwa rezim Soeharto sebenarnya masih berpotensi di era reformasi.⁷⁵ Pemilu adalah salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pimpinan nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam proses pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi.

Berbeda dengan masa Orde Baru, pemilu 1999 yang dilakukan pasca-reformasi kental dengan euforia demokrasi. Banyak partai politik didirikan untuk menggaungkan ide mereka yang tidak jarang hanya dilandaskan pada paham keagamaan dan primordialisme sempit. Sebagai masa transisi menuju demokrasi, pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi OPP (Organisasi Peserta Pemilu) dari 141 partai politik yang mendaftar di Departemen Dalam Negeri. Pada pemilu ini, meski diikuti 48 partai politik, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih

⁷⁴ Indraja, "Perkembangan Pemilihan Presiden....", h. 67.

⁷⁵ Fiska Friyanti, *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia*, (Skripsi strata satu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005), h. 81.

dilakukan melalui mekanisme perwakilan melalui sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁷⁶

Sidang umum MPR-RI muncul dua calon Presiden yang bersaing, yakni Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid didukung oleh Poros Tengah, koalisi partai-partai politik Islam dan Nasionalis, sementara Megawati Soekarnoputri didukung oleh PDI Perjuangan. Munculnya Abdurrahman Wahid menjadi calon dari Poros Tengah sebagai pengganti BJ Habibie yang didukung Poros Tengah tetapi tidak bersedia maju setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI. Setelah melalui pemungutan suara secara tertutup yang dramatis dan disiarkan langsung oleh berbagai stasiun TV, akhirnya Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan. Abdurrahman Wahid memperoleh suara sebanyak 373, sedangkan Megawati Soekarnoputri mendapatkan dukungan 313 suara. Setelah MPR-RI berhasil memilih Presiden, kemudian dilakukan pemilihan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR berhasil memilih K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Republik Indonesia dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.⁷⁷

Tahun 2004 merupakan pemilu yang pertama kalinya dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden karena adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat 1 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 dimana adanya sistem seleksi awal (*early selection*) dari banyak kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 ini melewati dua tahapan pemilihan karena tidak ada pasangan yang meraih suara lebih dari 50% pada putaran pertama, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, dua pasangan teratas kemudian bersaing pada putaran kedua. Pada putaran pertama pasangan

⁷⁶ Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 96.

⁷⁷ Indraje, “Perkembangan Pemilihan Presiden....”, h. 68.

Susilo Bambang Yudhoyono dengan Muhammad Jusuf Kalla memperoleh suara 33,58% dan pasangan Megawati Soekarnoputri dengan Ahmad Hasyim Muzadi memperoleh suara 26,24%. Pada pemilu putaran kedua dengan hasil selisih cukup jauh yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla dengan memperoleh suara 60,62%. Sedangkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Hsyim memperoleh suara 39,38%. Dengan demikian, pemilu tahun 2004 ini menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.⁷⁸

Pemilihan Presiden tahun 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan hanya berlangsung satu putaran. Karena Susilo Bambaang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono meraih suara signifikan dibandingkan dua pasangan lainnya. Kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono meraup suara 60,80%, jauh meninggalkan lawannya Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto yang meraih suara 26,79% dan pasangan Jusuf Kalla dengan Wiranto mendapat suara 12,41%.⁷⁹ Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 untuk masa jabatan 2009-2014.

Tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali melakukan pesta demokrasi terbesar. Pemilihan ini menjadi pemilihan Presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang Presiden.

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau

⁷⁸ Yahya Mulyana Aziz, Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik....*, h. 134.

⁷⁹ *Ibid*, h. 135.

memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-undang tersebut tetap berlaku.

Pemilihan umum ini akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% .⁸⁰ Sedikitnya pasangan pilpres kali ini menjadikan persaingan di antara kedua pasangan calon pemimpin nasional ini sangat ketat, bahkan telah menciptakan polarisasi di tengah masyarakat Indonesia. Kesengitan persaingan dua pasangan tersebut tecermin dari maraknya kampanye negatif dalam rangka saling menjatuhkan lawan.

Namun demikian, pilpres 2014 telah menjadi tonggak bersejarah bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Di balik beragam kekurangan dan ketidakpuasan terhadap jalannya pilpres, banyak kalangan menilai pilpres 2014 berlangsung aman. Kekhawatiran banyak pihak terhadap kemungkinan pilpres 2014 akan melahirkan disintegrasi bangsa ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, bangsa Indonesia telah belajar banyak hal dari pemilu dan pilpres sebelumnya di mana sistem demokrasi pada akhirnya akan memutuskan siapa sebagai pemenang dan siapa pihak yang kalah. Bangsa Indonesia telah menyadari sepenuhnya bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih penting dari sekedar pesta demokrasi. Sikap demokratis dan kenegarawanan telah ditunjukkan oleh pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang mengakui secara terbuka kemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sikap kewarganegaraan pasangan yang kalah juga ditunjukkan saat Prabowo dan Hatta Rajasa menghadiri pelantikan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di gedung MPR-DPR. Sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014,

⁸⁰ Indraja, "Perkembangan Pemilihan Presiden....", h. 69.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.⁸¹

Pilpres 2019 merupakan Pemilu secara langsung yang ke empat. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraannya. Dengan jumlah partai politik pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, yang mana ketika Pemilu 2014, partai politik pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan hasil Pemilu legislatif 3 bulan sebelumnya, maka untuk Pemilu 2019 kali ini juga didukung oleh hasil Pemilu legislatif yang sama ketika Pemilu legislatif 2014 yang lalu. Berarti, hal ini tidak memberikan ruang untuk partai Politik baru seperti partai Garuda, Perindo, PSI, dan partai Berkarya ikut mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden meski sebagai peserta Pemilu 2019 ini.⁸²

Pilpres 2019 memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, untuk memperebutkan kursi Presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan politik antara kedua kubu pendukung calon Presiden. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.⁸³

Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengalahkan Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara sebanyak 55.5%, sedangkan pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan suara sebanyak 44,5%.⁸⁴

⁸¹ Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi....*, h. 97.

⁸² Hilman Bee, "Mengenal Perbedaan UU Pemilu 2019 dengan UU Pemilu Sebelumnya". (On-line), tersedia di : <https://www.radarbangsa.com/opini/16532/mengenal-perbedaan-uu-pemilu-2019-dengan-uu-pemilu-sebelumnya> (31 Desember 2018).

⁸³ Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 16, No. 1 (Juni 2019), h. 69.

⁸⁴ "Perhitungan Suara KPU" (On-line), tersedia di: <https://www.detik.com/pemilu/hitung-suara-kpu> (3 Desember 2019).

Berkaitan dengan mekanisme pemilihan Presiden di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, antara lain :⁸⁵

- a. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (Pasal 8).
- b. Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (Pasal 13 Ayat 1).
- c. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan. (Pasal 16 Ayat 1).
KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan. (Pasal 16 Ayat 2). Apabila persyaratan administratif bakal Pasangan Calon belum lengkap, maka KPU memberi kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan administratif dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU yang tercantum pada pasal 17 ayat 1, 2 dan 3. Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti. (Pasal 18 Ayat 1).
- d. KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi. (Pasal 21 Ayat 1). Penetapan

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 21 Ayat 2). KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Pasal 21 Ayat 3).

- e. Pengawasan atas verifikasi kelengkapan administratif Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administratif Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU. (Pasal 26 Ayat 1). Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU. (Pasal 26 Ayat 2). KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (Pasal 26 Ayat 3).
- f. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. (Pasal 33).
- g. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan dan pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan. (Pasal 111 Ayat 1).
- h. Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. (Pasal 132 Ayat 1). Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara. (Pasal 132 Ayat 2).
- i. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten/kota. (Pasal 146 Ayat 2).

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Provinsi. (Pasal 150 Ayat 2). Rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Banwaslu. (Pasal 153 Ayat 2).

- j. KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Bawaslu. (Pasal 158 Ayat 1). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemungutan suara. (Pasal 158 Ayat 2).
- k. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. (Pasal 159 Ayat 1). Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2(dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 159 Ayat 2). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 159 Ayat 3). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. (Pasal 159 Ayat 4). Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan

persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. (Pasal 159 Ayat 5).

1. Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Pasal 161 Ayat 1). Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden. (Pasal 161 Ayat 2). Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden. (Pasal 161 Ayat 3).

4. Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia

Kriteria pemilih dalam pemilihan Presiden diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi :⁸⁶

Pasal 27

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih.

⁸⁶ *Ibid.*

Pasal 28

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.

Bagian Kesatu

Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara

Pasal 29

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS memutakhirkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (4) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedua
Rekapitulasi Pemilih

Pasal 30

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilih luar negeri dan Pemilih secara nasional.

Bagian Ketiga
Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 31

- (1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan *research* terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian skripsi UIN Raden Intan Lampung yang dilakukan oleh Ariza Rahmawati yang berjudul “Kriteria Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap kriteria pemilih tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Data yang dipakai peneliti untuk menganalisis data yaitu deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kriteria pemilih dalam pemilihan Kepala Negara telah sesuai dengan *fiqh siyasah*. Kriteria pemilih dalam *fiqh siyasah* diantaranya adalah Pertama, batasan usia 17 tahun, sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang Kepala Negara yang akan dipilih. Kedua, memiliki moral yang baik, yaitu tidak melakukan tindak pelanggaran, sikap yang teguh, mempertahankan prinsip. Ketiga, menjamin hak untuk memilih.

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian skripsi UIN Raden Intan Lampung oleh Ines Wulandari yang berjudul Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden menurut hukum Islam, serta bagaimana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Adapun metode yang dipakai untuk menganalisis data yaitu *Content Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dilihat dari tata cara pemilihan *khulafaur rasydin* karena dalam Islam tidak ada dalil *nash* atau hadis yang menjelaskan bagaimana tata cara atau mekanisme pemilihan Kepala Negara, jadi sebagai pedoman mengikuti sejarah yang telah terjadi sebelumnya. Sedangkan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal tersebut terjadi berdasarkan Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar Tahun 1945 terhadap Pasal 6A ayat (1), dan diperjelas dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Nomor 22E dalam Pasal 1 dan 2.

Dari kedua penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi yang saya buat. *Pertama*, Kedua penelitian diatas merupakan penelitian kepustakaan. Sedangkan skripsi saya merupakan penelitian lapangan. *Kedua*, Penelitian pertama menunjukkan kriteria pemilih Presiden hanya dari perspektif tokoh-tokoh ketatanegaraan Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu. Sedangkan skripsi yang saya kerjakan dalam memandang kriteria pemilih Presiden tidak hanya dari tokoh-tokoh ketatanegaraan Islam melainkan mengikut sertakan mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk menyumbangkan ide atau gagasannya. Undang-undang yang dipakai sebagai landasan pun berbeda, penelitian pertama menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu. Sedangkan saya menggunakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, Penelitian kedua menganalisis mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sedangkan saya meneliti kriteria pemilih Presiden. Disini jelas terdapat perbedaan antara penelitian kedua dengan skripsi yang saya kerjakan.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amrullah dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian "suatu pendekatan praktik"*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Aziz, Yahya Mulyana, Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nusul*, Surakarta: Al-Hanan, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djafar, Massa, *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Friyanti, Fiska, *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia*, Skripsi strata satu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005.
- Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin: Telaah Sistem Jama'ah Dalam Gerakan Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadi Abu ath-Thayyib, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415.
- Nawawi, Imam, Penerjemah Acmad Sunarto, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Ahmani, 1996.
- Rahardjo, M. Dawam, ed. *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*. Jakarta: Cides, 1995.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, ed, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Abadi Mahasatya, 2007.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suntana, Ija , *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Syarif, Inu Kencana, *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tim PBAK, *Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK)*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Jurnal-Jurnal

- Indraja, Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018.
- Zuhro, Siti, Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019, *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 16, No. 1, Juni 2019.

Wawancara

- Wawancara Jessica Rahma (Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017), Bandar Lampung, 15 Desember 2019.
- Wawancara Liana Yunita (Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2017), Bandar Lampung, 14 Desember 2019.
- Wawancara Afryan Wahyu (Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2017), Bandar Lampung, 17 Desember 2019.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Internet

- Hilman Bee, "Mengenal Perbedaan UU Pemilu 2019 dengan UU Pemilu Sebelumnya". (On-line), tersedia di : <https://www.radarbangsa.com/opini/16532/mengenal-perbedaan-uu-pemilu-2019-dengan-uu-pemilu-sebelumnya> (31 Desember 2018).

“Perhitungan Suara KPU”. (On-line), tersedia di:
<https://www.detik.com/pemilu/hitung-suara-kpu> (3 Desember 2019).